

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Tujuan nasional yang hendak dicapai bangsa Indonesia tersurat dengan sangat jelas dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, yaitu 1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, 2) memajukan kesejahteraan umum, 3) mencerdaskan kehidupan bangsa, 4) ikut melaksanakan ketertiban dunia. Atas dasar tujuan yang ketiga, maka diperlukan sistem pendidikan nasional yang mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi serta efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan global. Pembaruan terhadap sistem pendidikan nasional dilakukan secara terencana, terarah dan berkesinambungan.

Undang-Undang Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 2/1989. Penggantian hukum tentang pendidikan nasional tersebut merupakan tuntutan pelaksanaan pembaharuan pendidikan yang diamanatkan dalam Amandemen UUD 1945 sebagai respon terhadap perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam konteks kehidupan sosial dalam era global berteknologi informasi dan komunikasi saat ini.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa pendidikan diselenggarakan

secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa; diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Pasal 1 mendefinisikan pengelolaan pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam sistem penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

Sebagai proses sosial, pendidikan terbingkai dalam pandangan sosiologis yang menekankan pada institusi serta peranan dan harapan masyarakat yang ada di dalam kehidupan manusia. Jadi secara sosiologis tujuan pendidikan seharusnya disesuaikan dengan tuntutan masyarakat. Dalam hal ini, pendidikan ditekankan pada pembentukan perilaku individual sesuai dengan peran sosial yang dicita-citakan masyarakat. Jadi pendidikan dapat dipahami sebagai sistem enkulturasi budaya, yaitu suatu metode implantasi budaya pada generasi muda demi kelangsungan eksistensi kebudayaan (Suhartono, 2009: 101).

Pendidikan disepakati oleh banyak ahli memiliki peran yang besar dalam penyediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan daya saing

yang tinggi. Lamanya mengenyam pendidikan dinilai memiliki banyak pengaruh terhadap pembentukan daya saing seseorang. Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin tinggi peluang seseorang untuk meningkatkan kualitas daya saing mereka dan semakin rendah tingkat pendidikan akan semakin sulit menumbuhkan kemampuan dan daya saing seseorang (Maliki, 2008: 272).

Maju tidaknya sebuah bangsa ditentukan oleh maju tidaknya pendidikan di bangsa tersebut. Pendidikan adalah penentu sebuah bangsa menjadi maju, berkembang dan berkualitas. Pendidikan yang dapat menjadikan bangsa yang berkualitas dan berakhlak karimah tidak dapat dilepaskan dari peran guru sebagai pemegang kunci keberhasilan sebuah pendidikan. Guru menjadi fasilitator yang melayani, membimbing, membina, dan meng-*install* dirinya sebagai konsultan akademik yang piawai mengusung siswa menuju gerbang keberhasilan. Hidup dan mati sebuah pembelajaran bergantung sepenuhnya kepada guru (Barizi, 2009: 7).

Salah satu masalah yang dihadapi dunia pendidikan kita adalah masalah lemahnya proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, anak kurang didorong untuk mengembangkan kemampuan berpikir. Proses pembelajaran di dalam kelas diarahkan kepada kemampuan anak untuk menghafal informasi, otak anak dipaksa untuk mengingat dan menimbun berbagai informasi tanpa dituntut untuk memahami informasi yang diingatnya itu untuk menghubungkannya dengan kehidupan sehari-hari.

Akibatnya ketika anak didik lulus dari sekolah, mereka pintar secara teoritis tetapi miskin secara aplikasi (Sanjaya, 2008: 1).

Dimanapun di dunia ini, kualitas pendidikan ditentukan oleh kualitas gurunya, bukan besarnya dana pendidikan dan hebatnya fasilitas. Jika guru berkualitas baik, baik pula kualitas pendidikannya. Contohnya adalah Finlandia, negara dengan kualitas pendidikan terbaik di dunia ini serius menjaga kualitas gurunya. Guru-guru di Finlandia boleh dikata adalah guru-guru kualitas terbaik dengan pelatihan terbaik pula. Profesi guru sendiri adalah profesi yang sangat dihargai, meski gaji mereka tidaklah fantastis. Lulusan menengah terbaik biasanya justru mendaftar untuk dapat masuk di sekolah-sekolah pendidikan dan hanya 1 diantara 7 pelamar yang bisa diterima, lebih ketat persaingannya ketimbang masuk ke fakultas bergengsi lainnya, seperti Fakultas Hukum dan Kedokteran (Rizali, 2009: 66).

Sekolah merupakan lembaga sosial yang keberadaannya merupakan bagian dari sistem sosial negara bangsa. Ia bertujuan untuk mencetak manusia susila yang cakap, demokratis, bertanggung jawab, beriman, bertakwa, sehat jasmani dan rohani, memiliki pengetahuan dan keterampilan, berkepribadian yang mantap dan mandiri dan lain sebagainya. Agar tujuan tersebut dapat tercapai maka dibutuhkan kurikulum yang kuat, baik secara infrastruktur maupun superstruktur (Soedijarto, 2008: 117). Kurikulum tersebut nantinya yang akan digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan seluruh kegiatan pembelajaran,

khususnya interaksi antara pendidik dengan peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar. Guru sebagai pendidik dituntut untuk dapat menyelenggarakan kegiatan pembelajaran yang menarik dan bermakna sehingga prestasi yang dicapai dapat sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Yamin (2009: 13) menjelaskan bahwa pendidikan bisa dijalankan dengan baik ketika kurikulum menjadi penyangga utama dalam proses belajar mengajar. Kurikulum mengandung sekian banyak unsur konstruktif supaya pembelajaran terlaksana dengan optimal.

Merujuk pentingnya kurikulum, maka kurikulum tersebut menjadi bagian pokok dalam sistem pendidikan. Seperti yang disampaikan oleh Drost (2006: 116) bahwa tugas pokok sekolah adalah mengajar dan lewat mengajar membentuk pribadi yang berintelektual maupun bermoral dewasa sesuai kemampuan belajarnya. Proses ini berlangsung dengan memakai kurikulum, yaitu kumpulan bidang studi yang perlu untuk mencapai *hocshschulreife*, kematangan masuk universitas. Kurikulum pada dasarnya jadi isi pengajaran tidak dapat didesentralisasi. Kurikulum IPA, IPS, Bahasa dan seterusnya sama untuk semua sekolah di seluruh dunia. Hanya luas dan dalamnya bahan studi yang disampaikan menentukan sulit tidaknya kurikulum konkrit itu.

Kurikulum yang saat ini berlaku adalah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). KTSP adalah kurikulum yang disusun oleh masing-masing sekolah dengan mengacu pada Standar Isi dan standar kompetensi

kelulusan serta berpedoman pada panduan yang disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) yang sesuai dengan amanat UU no 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan PP no 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Untuk dapat menerapkan KTSP tersebut, maka sekolah memerlukan pengelolaan pendidikan yang tepat dan akurat. Sobri (2009: 3) mendefinisikan pengelolaan pendidikan adalah serangkaian kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, memotivasi, mengendalikan, dan mengembangkan segala upaya di dalam mengatur dan mendayagunakan sumber daya manusia, sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan pendidikan. Atau secara sederhana pengelolaan pendidikan merupakan proses pencapaian tujuan pendidikan melalui kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pemotivasian, dan pengendalian.

Secara lebih jelas, Asmani (2009: 69) menyatakan bahwa lembaga pendidikan membutuhkan manajemen profesional agar penyelenggaraan pendidikan berjalan dengan dinamis, kompetitif, dan produktif. Tanpa manajemen profesional, lembaga pendidikan akan berjalan di tempat, tidak tertata rapi, mudah goyah, terancam konflik internal, dan tidak mampu melakukan konsolidasi, apalagi melakukan ekspansi ke luar.

Manajemen pendidikan dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Mulyono (2009: 168-170) menjelaskan macam-macam manajemen pendidikan menjadi sepuluh, yaitu manajemen kurikulum, manajemen ketenagaan pendidikan, manajemen peserta didik, manajemen sarana dan

prasarana, manajemen keuangan/pembiayaan pendidikan, manajemen administrasi perkantoran, manajemen unit-unit penunjang pendidikan, manajemen layanan khusus pendidikan, manajemen tata lingkungan dan keamanan sekolah dan manajemen hubungan dengan masyarakat. Secara umum, semakin besar dan maju suatu lembaga pendidikan, semakin banyak ruang lingkup manajemen yang harus ditangani sekolah. Demikian juga sebaliknya.

Pembelajaran merupakan komponen utama dari sekolah, oleh karena itu pengambilan keputusan sekolah dalam bidang pembelajaran tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang. Pengambilan keputusan merupakan bagian dari manajemen sekolah dimana manajemen ini membutuhkan peran seorang pemimpin. Pengambilan keputusan di sekolah tidak lepas dari kepemimpinan sekolah. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bafadal (2003: 44) bahwa keberhasilan suatu institusi dalam menjalankan program yang telah direncanakan atau diorganisasikan perlu didukung dengan sebuah kepemimpinan yang efektif.

Kepemimpinan tersebut terkait erat dengan kepala sekolah. Apabila kepala sekolah menggunakan pola otokratis atau otoriter maka akan muncul kesan kepala sekolah itu orang yang sudah banyak pengetahuan dan pengalaman sehingga meremehkan input yang datang dari *grassroot*. Menurut Hasibuan (2007: 172), dalam kepemimpinan otoriter pengambilan keputusan dan kebijakan hanya ditetapkan sendiri

oleh pemimpin, bawahan tidak diikutsertakan untuk memberikan saran, ide, dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

Seseorang dengan motivasi berprestasi yang tinggi cenderung lebih tinggi skornya dalam menyelesaikan tugas-tugas dan berorientasi pada prestasi. Sering lebih cepat dan berorientasi ke masa depan, realistis dan sering merasa takut gagal dalam menyelesaikan pekerjaan, menolak kata-kata yang berhubungan dengan kegagalan serta menghargai hasil kerja orang lain dan inovatif. Danim (2009: 39) melanjutkan bahwa keunggulan sekolah akan tercapai bila dipimpin oleh kepala sekolah yang memiliki motivasi berprestasi tinggi.

Baik manajemen dan kepemimpinan sangat berkaitan dengan sekolah dan segala kegiatan yang berlangsung di sekolah tersebut. Di SMP Negeri 2 Pacitan, ada dua jenis manajemen kelas, yaitu kelas reguler dan kelas unggulan. Diantara kedua kelas tersebut terdapat beberapa perbedaan. Jika dilihat dari jam mengajarnya, kelas unggulan pada beberapa mata pelajaran tertentu mempunyai jam pelajaran yang lebih banyak. Begitu juga dengan sarana prasarana pendukung kegiatan belajar mengajar juga lebih lengkap. Termasuk dalam seleksi masukpun juga berbeda dimana batas nilai yang diterapkan juga lebih tinggi.

Kelas unggulan ini berorientasi pada mutu pendidikan yang lebih baik. Seperti yang disampaikan oleh Arcaro (2007: 43) bahwa mutu dalam pendidikan meminta adanya komitmen pada kepuasan kostumer dan

komitmen untuk menciptakan sebuah lingkungan yang memungkinkan parastaf dan siswa menjalankan pekerjaan sebaik-baiknya.

Untuk mendukung kelas unggulan, termasuk pembelajaran yang diterapkan di kelas unggulan, manajemen kelas unggulan perlu mendapat perhatian sehingga mutu pendidikan juga dapat meningkat. Sesuai dengan yang uraian dalam latar belakang tersebut, maka penelitian ini membahas tentang pengelolaan pembelajaran kelas unggulan berbasis mutu dengan lokasi penelitian di SMP Negeri 2 Pacitan.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka focus penelitian ini adalah bagaimana karakteristik pengelolaan pembelajaran kelas unggulan berbasis mutu. Fokus tersebut dapat dijabarkan menjadi tiga subfokus.

1. Bagaimana karakteristik *layout* kelas unggulan dalam pembelajaran berbasis mutu di SMP Negeri 2 Pacitan?
2. Bagaimana karakteristik pengayaan materi ajar kelas unggulan dalam pembelajaran berbasis mutu di SMP Negeri 2 Pacitan?
3. Bagaimana karakteristik hubungan guru dengan siswa pada kelas unggulan dalam pembelajaran berbasis mutu di SMP Negeri 2 Pacitan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mencapai beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan karakteristik layout kelas unggulan dalam pembelajaran berbasis mutu di SMP Negeri 2 Pacitan.
2. Mendeskripsikan karakteristik pengayaan materi ajar kelas unggulan dalam pembelajaran berbasis mutu di SMP Negeri 2 Pacitan.
3. Mendeskripsikan karakteristik hubungan guru dengan siswa pada kelas unggulan dalam pembelajaran berbasis mutu di SMP Negeri 2 Pacitan.

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan hasil penelitian ini maka dapat diperoleh manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang mendalam tentang pengelolaan pembelajaran berbasis mutu di SMP Negeri 2 Pacitan.

2. Manfaat praktis

- a. Kepala dinas pendidikan dapat memberikan evaluasi terhadap pembelajaran berbasis mutu sehingga dapat melakukan perbaikan dan menginformasikan kepada khalayak.

- b. Kepala sekolah dapat memberikan prioritas dalam mengelola pembelajaran berbasis mutu sehingga prestasi sekolah dapat dipertahankan dan ditingkatkan dari waktu ke waktu.
- c. Warga sekolah dapat mengikuti layanan khusus berupa kelas unggulan secara berkelanjutan sehingga sekolah dapat mempunyai keunggulan akademis yang konsisten.
- d. Komite sekolah dapat menjadi mitra kerja yang konstruktif dalam memberikan panduan dan pandangan dalam mengelola pembelajaran berbasis mutu secara efektif dan efisien.

E. Definisi Istilah

1. Pengelolaan pembelajaran adalah kemampuan dalam mengelola secara operasional dan efisien terhadap komponen-komponen yang berkaitan dengan pembelajaran sehingga menghasilkan nilai tambah terhadap komponen tersebut menurut norma/standar yang berlaku.
2. Pembelajaran berbasis mutu adalah proses pembelajaran yang mengedepankan mutu sehingga dapat memuaskan siswa dari segi pelaksanaan maupun hasil dan diperoleh output yang berguna.
3. *Layout* kelas adalah penataan meja kursi dan inventaris kelas lainnya yang dapat mendukung suasana kondusif dalam pembelajaran.
4. Pengayaan materi ajar adalah pengembangan materi ajar berdasarkan kompetensi dasar yang digunakan untuk melaksanakan pembelajaran.

5. Interaksi pembelajaran adalah pertukaran dan aliran informasi serta ide-ide dari guru kepada siswa yang berlangsung dua arah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.
6. Sekolah unggulan adalah instansi pendidikan yang mempunyai visi dan misi unjadi sekolah unggul daripada sekola-sekolah lain dengan menitikberatkan pada kualitas lulusan.